BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Lumpur Lapindo
Edisi : 8 Januari 2008
Halaman : 12

Akibat Luberan Lumpur Lapindo

Warga Siring Barat Tuntut Desanya Masuk Peta Terdampak

[SIDOARJO] Ratusan warga Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), menuntut desanya masuk dalam peta terdampak lumpur panas bercampur gas agar mendapatkan ganti rugi dari PT Lapindo Brantas. Sementara itu, dua hari sebelumnya, warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, melakukan tuntutan yang sama.

Tuntutan dilakukan setelah ratusan rumah warga tersebut yang berada di sisi barat dari pusat semburan, terendam air lumpur setelah tanggul penahan lumpur panas Lapindo jebol.

Wakil warga Siring, Mahmud, ketika menyampaikan orasinya di depan Kantor Kecamatan Porong, Senin (7/1) mengatakan, desanya sejak semburan terjadi 29 Mei 2006, sudah tidak layak ditempati. Air lumpur beberapa kali menggenangi sebagian Desa Siring. Apalagi ditambah terjadinya luberan lumpur di Ketapang dua hari lalu, kondisi Siring semakin tidak layak.

Ancaman jebolnya tanggul penahan lumpur, sewaktu-waktu terjadi. Akibatnya, akan merendam Siring. "Kami siap pindah ke lokasi yang aman dari luberan lumpur, karena itu mohon diberikan ganti rugi seperti desa yang masuk terdampak lumpur," kata Mahmud.

Warga Siring, kata Mahmud, saat ini hidup dalam kondisi tidak sehat. Jika tanggul jebol kemu-dian air lumpurnya merendam Siring, maka tidak diberikan gan-ti rugi karena di luar peta ter-dampak.

"Antara kami dengan mereka yang telah memperoleh ganti rugi sama-sama menderitanya, tetapi jika diterjang lumpur tidak berhak atas ganti rugi. Karena itu, kami akan terus menuntut," kata Mahmud.

Gubernur Jatim, Imam Utomo Suparno, seusai memimpin rapat koordinasi penangan lumpur di rumah dinasnya di Surabaya, Senin (7/1) mengatakan, perubahan peta terdampak merupakan kewenangan pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, tidak memiliki kewenangan, karena peta tersebut ditentukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2007.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menambahkan, sulit mengubah peta terdampak, karena penentuan tersebut sudah dituangkan dalam Perpres. Tetapi warga yang terkena dampak akibat tanggul jebol akan mendapatkan bantuan Rp 500.000 per keluarga.

Bantuan tersebut berasal dari bantuan badan usaha milik negara (BUMN) dan dana taktis dari Pemkab Sidoarjo. Warga yang berhak atas dana itu masing-masing sebanyak 260 keluarga warga Siring dan 592 keluarga dari Ketapang.

Gagal Panen

Sementara itu, hasil rapat koordinasi tentang penanganan lumpur Lapindo menyimpulkan, akan mengkaji ulang pemberian ganti rugi gagal panen, karena jumlah yang akan diberikan ganti rugi terus bertambah dari yang terda-ta sebelumnya meliputi empat desa berkembang menjadi delapan desa.

Dana tersebut semula Rp 2,6 miliar yang merupakan *sharing* Pemprov Jatim dengan Lapindo. Tetapi setelah menjadi delapan desa, dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi gagal panen menjadi Rp 13 miliar.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup